LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT

HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS TRIWULAN III TAHUN 2026

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT

HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TRIWULAN III TAHUN 2026

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Makassar
Pada Hari Rabu, 14 Oktober 2026

Ketua Pengadilan,

SAFRI, S.H., M.H.
NIP. 196906081997021001

Sekretaris Tim Survei,

NURIYA AWAD, S.H.
NIP. 197503302000032002

Ketua Tim Survey,

FITRIAH ADE MAYA, S.H.
NIP. 197609292001122003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami Tim Survey Pengadilan Negeri Makassar mampu menyelesaikan Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN III TAHUN 2026.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus , yang diambil secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Semoga hasil laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan seluruh unit pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 14 Oktober 2026

Tim Survei

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 3

DAFTAR ISI 4

BAB I PENDAHULUAN 5

A. Latar Belakang 5

B. Tujuan dan Sasaran 6

C. Prinsip 6

D. Pelaksanaan 7

E. Tahapan Pelaksanaan 7

BAB II HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN 8

BAB III RENCANA TINDAK LANJUT 3 (TIGA) UNSUR TERENDAH HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI 10

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 11

A. Kesimpulan 11

B. Rekomendasi 12

RUJUKAN: 13

LAMPIRAN-LAMPIRAN. 14

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan dan Sasaran

Maksud Penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Prinsip

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Persepsi Anti Korupsi dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Transparan
   Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi harus dipublikasikan pada website resmi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat
2. Partisipatif
   Dalam melaksanakan survey melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survey yang sebenarnya
3. Akuntabel
   Hal-hal yang diatur dalam Survey Persepsi Anti Korupsi harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku
4. Berkesinambungan
   Survey Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan

5. Keadilan
   Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa mebedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan, dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental
6. Netralitas
   Dalam melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

D. Pelaksanaan

Pengukuran/survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ini dilaksanakan pada bulan Juli s/d September 2026.

E. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan ***Teknik Sampel Morgan dan Krejcie***.
2. Tim survei menyiapkan fasilitas untuk pengambilan responden secara elektronik yaitu 1 komputer /pc, melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dimana instrument kuesioner pada Aplikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Memastikan bahwa computer/pc yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet
4. Membuka browser / peramban halaman website
5. Membuka alamat website : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/099422
6. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II
HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) sejumlah 51 data. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **97,94% atau pada nilai 3,92**.

Hasil IPAK tersebut di atas, terdiri dari sepuluh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6
Hasil
Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan
di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Manipulasi Peraturan	3,975
U2	Penyalahgunaan Jabatan	3,975
U3	Menjual Pengaruh	4,000
U4	Transaksi Biaya	3,775
U5	Biaya Tambahan	3,775
U6	Hadiah	3,975
U7	Transparansi Biaya	3,775
U8	Percaloan	3,975
U9	Perbuatan Curang	3,950
U10	Transaksi Rahasia	4,000
	Total	**39,17**
	Rata Rata	**3,92**

Berikut ini 3 unsur terendah pada Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN III TAHUN 2026.

No.	Ruang Lingkup	Indeks	Nilai
1	Indikator Transparansi Biaya (U7)	3,775	3.78
2	Indikator Biaya Tambahan (U5)	3,775	3.78
3	Indikator Transaksi Biaya (U4)	3,775	3.78

Adapun Rencana Tindak Lanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN III TAHUN 2026 akan disajikan pada Bab 3.

BAB III
RENCANA TINDAK LANJUT
HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk meningkatkan pelayanan yaitu sebagai berikut.

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Tahun 2026			Tahun 2026			Penanggungjawab
			Bln. Apr	Bln. Mei	Bln. Jun	Bln. Jul	Bln. Agu	Bln. Sep	
1	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan? (U7)	Memberikan pembinaan setiap pagi dan sore kepada seluruh petugas PTSP agar dalam memberikan pelayanan agar berpedoman pada SOP yang berlaku.	√	√	√	√	√	√	Panitera dan Sekretaris
2	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?(U5)	Memberikan pembinaan setiap pagi dan sore kepada seluruh petugas PTSP agar dalam memberikan pelayanan selalu menjaga integritas.	√	√	√	√	√	√	Panitera dan Sekretaris
3	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?(U4)	Memberikan pembinaan setiap pagi dan sore kepada seluruh petugas PTSP agar selalu memahami SOP yang berlaku.	√	√	√	√	√	√	Panitera dan Sekretaris

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, isimpulkan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **3,92** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,975**;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,975**;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **4,000**;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,775**;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,775**;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,975**;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,775**;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,975**;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,950**;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **4,000**;

Berikut ini 3 (tiga) unsur terendah pada Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Ruang Lingkup	Indeks	Nilai
1	Indikator Transparansi Biaya (U7)	3,775	3.78
2	Indikator Biaya Tambahan (U5)	3,775	3.78
3	Indikator Transaksi Biaya (U4)	3,775	3.78

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar TRIWULAN III TAHUN 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa **mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,3 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi**.

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup Manipulasi Peraturan, Transaksi Biaya dan Hadiah**.** Berdasarkan hasil survei ini, ketiga ruang lingkup tersebut berada pada unsur terendah, sehingga untuk melaksanakan pelayanan secara maksimal agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Petugas PTSP meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi jam kerja pelayanan di meja PTSP
2. Agar Petugas PTSP memahami SOP pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi.
3. Agar Petugas PTSP diberikan pelatihan dan sosialisasi untuk SOP serta penerapan Reward dan Punishment.
4. Agar Petugas PTSP senantiasa menyiapkan checklist di meja PTSP masing-masing

RUJUKAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Makassar: Pustaka Belajar

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset.

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

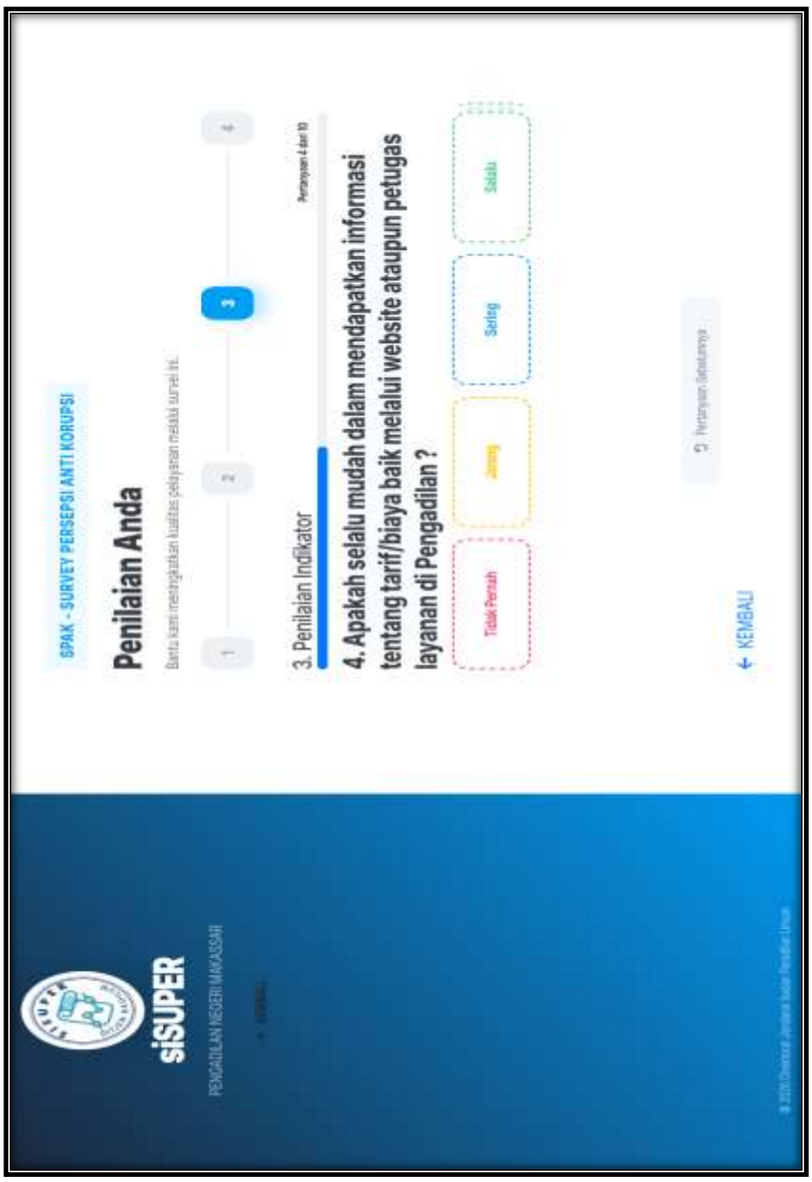

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
1. Data Responden
LANJUTKAN
ASN/PNS/PPPK
TNI
POLRI
SWASTA
WIRAUSAHA
TENAGA KONTRAK
siSUPER
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

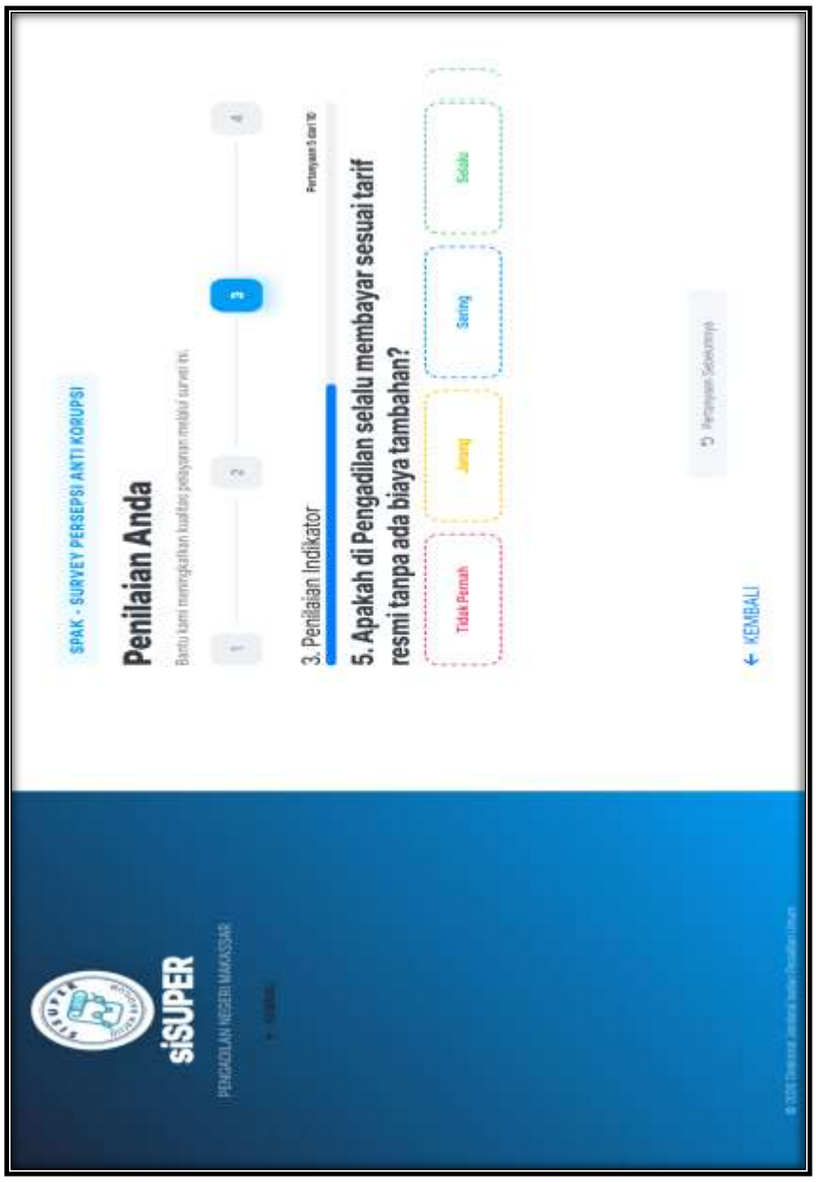

siSUPER
SPAK – SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
2. Informasi Layanan
Pilih Opsi...
Pilih Opsi...
KEMBALI
LANJUTKAN

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.
1
2
3
4
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 9 dari 10
1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
Tidak Sesuai Prosedur
Jarang Sesuai Prosedur
Sering Sesuai Prosedur
Selalu Sesuai Prosedur
KEMBALI
siSUPER
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR


SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3. Penilaian Indikator
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?
Petugas melayani tanpa meminta imbalan
Petugas melayani jarang meminta imbalan
Petugas melayani kadang meminta imbalan
Petugas melayani selalu meminta imbalan
KEMBALI
siSUPER

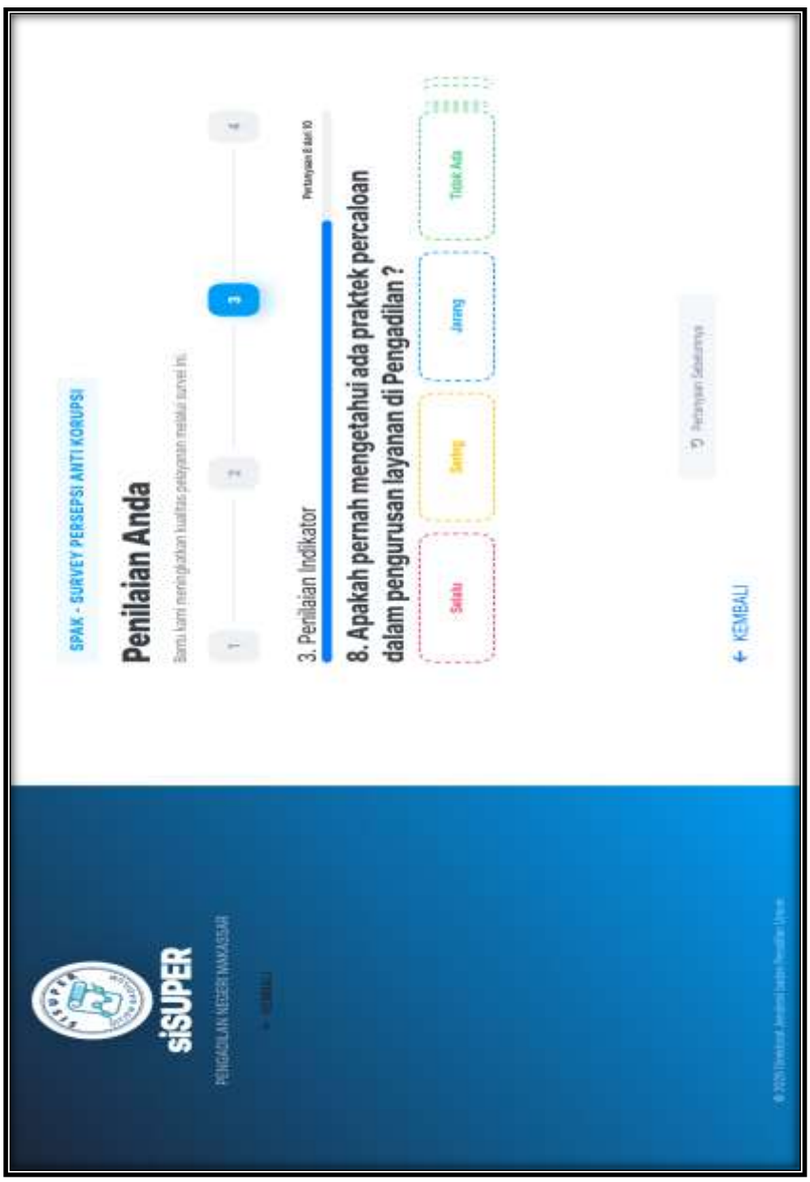
SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3. Penilaian Indikator
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?
Sering
Jarang
Tidak Ada
KEMBALI
siSUPER
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

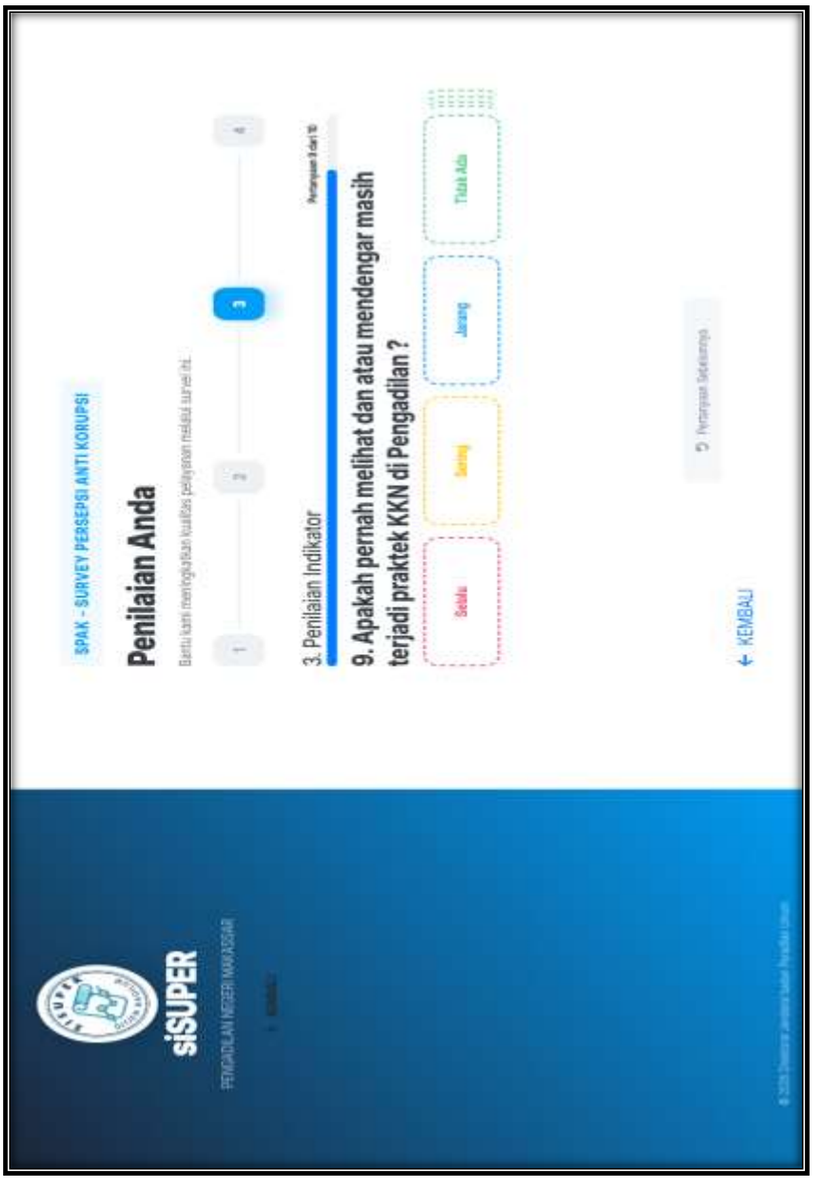

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.
1
2
3
4
3. Penilaian Indikator
Pertanyaan 4 dari 10
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
Pertanyaan Sebelumnya
KEMBALI
siSUPER
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

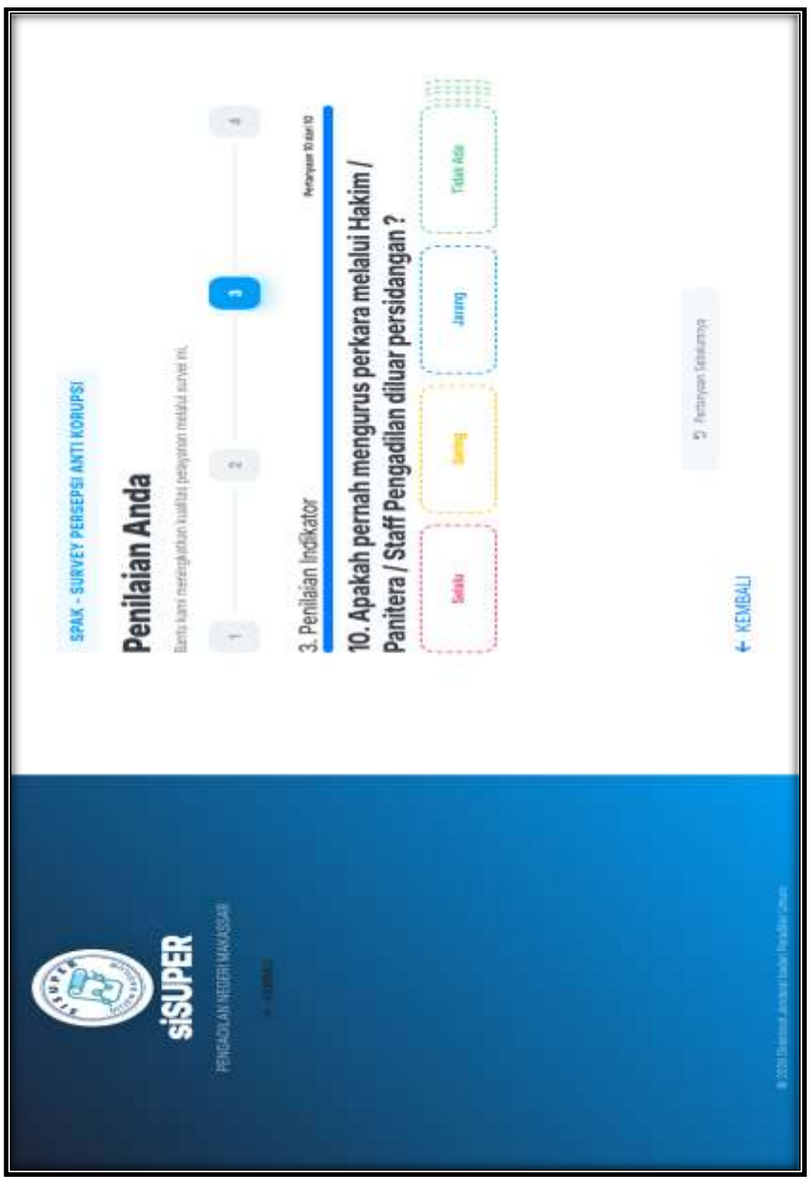

siSUPER
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3. Penilaian Indikator
5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
KEMBALI

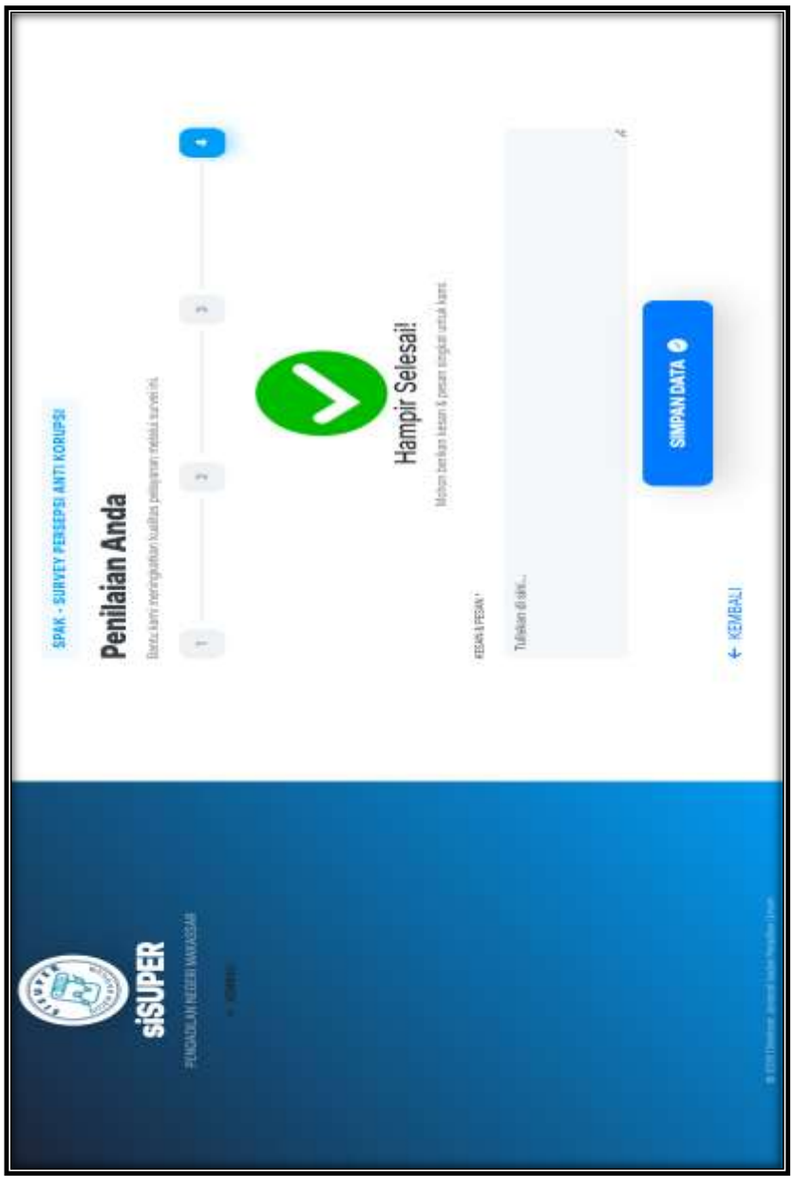
SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3. Penilaian Indikator
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
Biasa
Sering
Jarang
Tidak Ada
KEMBALI
siSUPER

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3. Penilaian Indikator
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu
KEMBALI
siSUPER


SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3. Penilaian Indikator
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
Sering
Jarang
Tidak Ada
KEMBALI
siSUPER
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR


SPAK – SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3. Penilaian Indikator
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?
Sering
Jarang
Tidak Ada
KEMBALI
siSUPER


SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
3. Penilaian Indikator
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
Selalu
Jarang
Tidak Ada
KEMBALI
siSUPER


siSUPER
SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Penilaian Anda
Hampir Selesai!
SIMPAN DATA
KEMBALI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jln. R.A. Kartini No. 18/23 KOTA MAKASSAR
SULAWESI SELATAN
http://www.pn-makassar.go.id/



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode: 1 Juli 2026 s/d 30 September 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS BERJALAN

3,92 / 97,94 %

JUMLAH	**40 RESPONDEN**	
GENDER	Laki-Laki : **29** org	Perempuan : **11** org
PENDIDIKAN	Tidak/Belum Sekolah : **0** org	Diploma 2 : **0** org
	SD : **0** org	Diploma 3 : **0** org
	SMP : **1** org	Sarjana S1 : **26** org
	SMU : **4** org	Magister S2 : **7** org
	Diploma 1 : **0** org	Doktor S3 : **2** org
PEKERJAAN	PNS : **4** org	Wiraswasta : **3** org
	TNI : **0** org	Wirausaha : **3** org
	Polri : **0** org	Tenaga Kontrak : **0** org
	Lainnya : **30** org	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	3.78
2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3.78
3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3.78